

Analisis Variabel Kegagalan Penawaran Kontraktor Lokal dalam E-Tendering di Kota Padang

Utami Dewi Arman^{1*}, Afrilda Sari², Nadra Arsyad³

^{1,2,3} Teknik Sipil, Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang, 25221, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: udewi2679@gmail.com

Received 20th Feb 2023; 1st Revision 12th March 2023; Accepted 24th March 2023

ABSTRAK

Pada umumnya, proyek-proyek pemerintah di kota Padang dilaksanakan oleh kontraktor non-lokal atau kontraktor yang bukan berdomisili di Kota Padang sehingga banyaknya kontraktor lokal yang gagal dalam proses e-tendering. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel kegagalan kontraktor lokal dalam mengikuti proses e-tendering dalam perspektif Pokja-ULP kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, melalui pengumpulan dokumentasi dan survey kuisisioner kepada responden dari Pokja ULP kota Padang. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis Relative Importance Index (RII), maka didapatkan beberapa kegagalan-kegagalan kontraktor lokal dalam evaluasi penawaran antara lain ; NPWP perusahaan atau pelunasan pajak selama beberapa tahun terakhir (X.1.3), Surat perjanjian kerja sama (SIKA)(X.2.3), Analisis teknis pekerjaan tidak lengkap (X.2.10), Lingkup kerja (scope of work) tidak lengkap (X.3.3), Surat referensi pengalaman kerja tidak dilampirkan (X.3.10) dan tingginya alokasi biaya overhead proyek yang dimasukkan ke dalam harga penawaran (X.4.3). Dengan mempertimbangkan hal ini, maka diharapkan kontraktor lokal untuk dapat melengkapi dokumen-dokumen terkait administrasi, kualifikasi, analisis teknis pekerjaan serta strategi harga penawaran untuk dapat memenangkan tender.

Kata Kunci: E-tendering; Kegagalan; Kontraktor; Penawaran; Relative Importance Index.

ABSTRACT

Generally, government projects in Padang are carried out by non-local contractors or contractors who are not domiciled in Padang city, so many local contractors fail in the e-tendering process. This study aims to identify and analyze the variables causing the failure of local contractors in following the e-tendering process from the perspective of the Pokja ULP. This research is a quantitative descriptive research, through the collection of documentation and questionnaire surveys to respondents from the Pokja ULP. Based on the results of data processing using Relative Importance Index (RII) analysis, were found several failures of local contractors failed in the e-tendering process, which is; NPWP or tax repayment for the last few years (X.1.3), Letter of cooperation agreement (SIKA)(X.2. 3), A technical analysis of the work is incomplete (X.2. 10), The scope of work is incomplete (X.3. 3), the Reference letter of work experience is not attached (X.3.10) and high allocation of project overhead costs are incorporated into the bid price (X.4. 3). By considering this, it is expected that local contractors will be able to complete documents related to administration, qualifications, technical analysis of work and bid price strategies to be able to win tenders.

Keywords: E-tendering; Failures, Contractors; Bidding; Relative Importance Index.

Copyright © Utami Dewi Arman, Afrilda Sari, Nadra Arsyad

This is an open access article under the: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Pada umumnya, proyek pemerintah di kota Padang dilaksanakan oleh kontraktor non-lokal atau kontraktor yang bukan berdomisili di Kota Padang disebabkan banyaknya kontraktor lokal yang gagal dalam proses e-tendering untuk memenangkan tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab-penyebab kegagalan kontraktor lokal yang sering ditemui oleh Pokja-ULP kota Padang. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintah selaku pemberi tugas pada proyek untuk kepentingan umum, melakukan evaluasi pada harga penawaran terendah dan metode pelaksanaan yang memadai dalam menentukan pemenang tender. Hal ini tentu saja membuat peserta lelang harus memiliki strategi penawaran yang kompetitif untuk memenangkan tender paket pekerjaan. Peserta lelang harus mampu memberikan harga penawaran yang terendah dan wajar dari harga paket pekerjaan namun tetap mendapatkan profit yang besar [3].

E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara elektronik dan terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa pekerjaan konstruksi, dimana penyedia jasa harus mendaftarkan perusahaan terlebih dahulu pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) [4]. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara SPSE yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Instansi atau Pemerintah Daerah yang membantu panitia pengadaan atau disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan *e-procurement*. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian ataupun di institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada instansi yang sudah ada. ULP merupakan suatu unit yang dibentuk dengan tujuan untuk membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien dan menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. Berikut kegiatan ULP kota Padang yang diuraikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Uraian Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang
(Sumber : Dokumentasi ULP Kota Padang)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Jabfun g PPBJ	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tahapan Persiapan								
2.	Menyampaikan RUP dan Dokumen terkait Perencanaan lainnya					1. RUP 2. Dokumen-dokumen Lain		RUP dan Dokumen Lain tersampaikan	
3.	Melaksanakan revisi : 1. Spesifikasi Teknis/KA K 2. Perkiraan Biaya/RAB					1. Draft Spesifikasi Teknis/KA K 2. RKA-KP/PD 3. Pagu DPA/DIPA		Laporan Hasil Reviu Spesifikasi Teknis/KA K & Perkiraan Biaya/RA	

								B	
4.	Memberikan Persetujuan Spesifikasi Teknis/KAK & RAB					Laporan hasil Reviu Spesifikasi Teknis/KAK & RAB		Persetujuan PA/KPA terhadap Spesifikasi Teknis/KAK & RAB	
5.	Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak : a. Jika diperlukan meminta pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan Rancangan Kontrak					1. Spesifikasi Teknis/KA K 2. RAB 3. Pagu DPA/DIPA		HPS dan Rancangan Kontrak tersusun	
6.	Memerintahka n untuk melaksanakan pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak					Permintaan Pendampingan Persiapan Pengadaan		Penugasa n Pendampi ngan Persiapan Pengadaa n	
7.	Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak					1. Surat Tugas Pendampin gan		Pendampi ngan	
8.	Menetapkan : 1. Spesifikasi Teknis/KA K 2. HPS					1. Draft KAK/Spesi fikasi Teknis 2. Draft HPS		Spesifikas i Teknis/K AK, HPS, Rancanga n Kontrak	

	3. Rancangan Kontrak				3. Draft Rancangan Kontrak		ditetapkan	
9.	Menyusun dan Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan				1. HPS 2. Spesifikasi Teknis/KA K 3. Rancangan Kontrak		Dokumen Persiapan Pengadaan	
10.	Selesai				1. HPS 2. Spesifikasi Teknik/KA K 3. Rancangan Kontrak		Dokumen Persiapan Pengadaan	

Beberapa hal yang menyebabkan kontraktor gagal dalam evaluasi penawaran pada *e-tendering* yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2 Variabel Kegagalan Penawaran Kontraktor

No	Variabel Kegagalan Penawaran Kontraktor	Referensi
X1	Aspek Kualifikasi	
X1.1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak dilampirkan	[8], [9]
X1.2	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak dilampirkan	[8]
X1.3	NPWP perusahaan atau pelunasan pajak selama beberapa tahun terakhir tidak dilampirkan	[8], [3], [9]
X1.4	Dokumen BPJS tenaga kerja ataupun kesehatan tidak dilampirkan	[8]
X1.5	Akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dilampirkan	[8]
X1.6	Dokumen Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) tidak dilampirkan	[8], [1]
X1.7	Pengalaman mengerjakan proyek sejenis dalam kurun 4 tahun terakhir tidak dilampirkan	[8], [7], [9]
X1.8	Persyaratan dokumen klasifikasi tidak memenuhi	[8]
X1.9	Sertifikat ISO 9001 dan OHSAS 18001 tidak tersedia atau tidak dilampirkan	[8], [7]
X1.10	Formulir Kemampuan Dasar (KD) tidak dilampirkan	[8], [9]
X.2	Aspek Administrasi	
X.2.1	Peserta lelang tidak menghadiri verifikasi/pembuktian dokumen asli	[8], [9]
X.2.2	Surat jaminan penawaran & Jaminan Penawaran tidak ada atau tidak dilampirkan	[3], [4], [7], [9]
X.2.3	Surat perjanjian kerja sama (SIKA) tidak ada atau tidak dilampirkan	[8]
X.2.4	Rincian Harga Penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga Satuan) tidak lengkap atau tidak dilampirkan	[8]
X.2.5	Dokumen penawaran tidak lengkap/tidak di upload	[3], [4], [7], [9]
X.2.6	Bagian aspek teknis pekerjaan dalam dokumen penawaran tidak ada	[8], [9]
X.2.7	Surat permohonan dukungan material tidak dilampirkan atau tidak sesuai dokumen penawaran	[8]
X.2.8	Surat permohonan dukungan peralatan tidak dilampirkan atau tidak sesuai dokumen penawaran	[8]
X.2.9	Data -data pendukung persyaratan teknis tidak dilampirkan	[8]

X.2.10	Analisis teknis pekerjaan tidak lengkap	[8]
X.2.11	Kurangnya waktu dalam mempersiapkan dokumen penawaran	[4], [7]
X.3	Aspek Teknis	
X.3.1	Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak memadai/tidak melampirkan metode pelaksanaan.	[8], [3], [4], [1], [9]
X.3.2	Spesifikasi teknis tidak memenuhi syarat	[4], [5], [9]
X.3.3	Lingkup kerja (<i>scope of work</i>) tidak lengkap	[5]
X.3.4	<i>Network planning</i> tidak dilampirkan	[5]
X.3.5	Jadwal pelaksanaan kegiatan (termasuk pengadaan material dan alat) tidak dilampirkan	[8], [4], [5], [7], [9]
X.3.6	Peralatan (jumlah, kapasitas, jenis, kepemilikan) tidak dilampirkan	[8], [7]
X.3.7	Kualifikasi personil inti tidak memenuhi syarat atau tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran	[8], [4], [7]
X.3.8	Struktur organisasi tidak lengkap untuk beberapa posisi organisasi proyek	[4]
X.3.9	Surat pernyataan kesediaan personil tidak sesuai/tidak dilampirkan	[8], [3]
X.3.10	Surat referensi pengalaman kerja tidak dilampirkan	[8]
X.3.11	Personil inti tidak sesuai persyaratan level pendidikan	[8]
X.3.12	Jumlah personil tidak mencukupi/kurang	[8], [7]
X.3.13	Ijazah asli tidak dapat ditunjukkan	[8]
X.3.14	Sertifikat kompetensi tidak dilampirkan/tidak memenuhi syarat	[8], [7]
X.3.15	NPWP personil tidak dilampirkan	[8]
X.4	Aspek Harga	
X.4.1	Satuan kebutuhan pekerja, material dan alat dalam AHSP tidak dicantumkan	[8]
X.4.2	Harga penawaran yang kompetitif	[3], [7]
X.4.3	Tingginya alokasi biaya overhead yang dimasukkan ke dalam harga penawaran	[4], [7]
X.4.4	HPS terlalu rendah	[4], [7]
X.4.5	Ketidakteelitian dalam survey harga pasar	[4], [1]
X.4.6	Estimator yang kurang berpengalaman	[4], [1], [5]
X.4.7	Kesalahan dalam memprediksi fluktuasi harga	[4], [1]

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi proses evaluasi penawaran kontraktor dalam *e-tendering* yang dilaksanakan oleh Pokja-ULP kota Padang serta variabel kegagalan kontraktor yang sering ditemui dalam memasukkan penawarannya. Data primer yang digunakan berupa data wawancara dan kuisioner kepada PPK Dinas PUPR, personil LPSE dan anggota Pokja-ULP Dinas PUPR yang berpengalaman menjadi panitia *e-tendering* selama 5 tahun terakhir, dengan jumlah sebanyak 35 responden untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan kontraktor dalam mengajukan penawarannya. Data-data yang diambil untuk kebutuhan penelitian ini adalah dokumentasi terkait mekanisme *e-tendering* yang dilaksanakan oleh Pokja-ULP kota Padang. Data diolah melalui pengujian statistik yakni uji validitas dan reabilitas serta perhitungan *Relative Important Index* (RII) untuk mendapatkan variabel kegagalan kontraktor yang paling sering ditemui dalam evaluasi penawaran pada proses *e-tendering* yang dilaksanakan oleh Pokja ULP kota Padang.

Untuk menghitung nilai RII menggunakan rumus sebagai berikut [2].

$$RII = \frac{\sum p_i U_i}{N(n)} = \frac{5U_5 + 4U_4 + 3U_3 + 2U_2 + 1U_1}{5N} \quad (1)$$

Dimana :

RII = Nilai RII

N = Jumlah responden

n = Skala tertinggi

p_i = Skala penilaian

U_i = Banyaknya nilai yang memilih skala penilaian pada variabel i

Ada beberapa tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini antara lain :

a. Studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan melakukan survey awal dan wawancara ke LPSE dan Dinas PUPR untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme *e-procurement* yang dilaksanakan di kota Padang.

b. Tinjauan literatur terkait *e-procurement*

Studi pustaka dilakukan untuk mempelajari literatur-literatur terkait *e-procurement*, regulasi, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan untuk mendapatkan teori pendukung.

c. Penetapan rumusan masalah dan tujuan penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan tinjauan literatur terkait maka dirumuskan masalah dan ditetapkannya tujuan penelitian.

d. Identifikasi mekanisme *e-tendering*

Mengidentifikasi mekanisme *e-tendering* yang dilakukan oleh Pokja-ULP Kota Padang melalui wawancara dan dokumentasi dari LPSE dan Dinas PUPR dan melakukan tinjauan literatur dan interview mengenai item-item yang dievaluasi dalam proses evaluasi penawaran.

e. Identifikasi variabel dominan kegagalan kontraktor dalam memasukkan dokumen penawaran dalam proses *e-tendering*

Variabel-variabel dominan kegagalan kontraktor dalam evaluasi penawaran diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu dan hasil interview. Instrumen penelitian dalam bentuk survey kuisisioner dan selanjutnya melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel-variabel tersebut. Selanjutnya variabel valid dan reliabel akan dianalisis dengan metode RII. Variabel-variabel yang memiliki ranking teratas dianggap sebagai variabel kegagalan kontraktor yang paling sering ditemui Pokja-ULP dalam proses evaluasi penawaran pada *e-tendering* di kota Padang.

f. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini menguraikan temuan-temuan selama proses pengumpulan data dan hasil pengolahan data kuisisioner yakni menentukan karakteristik responden dan variabel-variabel kegagalan yang paling sering ditemui oleh kontraktor lokal dalam *e-tendering*.

g. Penutup

Pada bagian ini menyimpulkan hasil-hasil penelitian, kelemahan yang dimiliki selama penelitian dan merekomendasikan saran untuk peneliti berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan hasil-hasil pengolahan data kuisisioner dan temuan-temuan yang ditemukan selama penelitian. Responden penelitian berjumlah 35 orang dengan beberapa karakteristik responden antara lain sebagai berikut: asal instansi dari Dinas PUPR sebanyak 57 %, ULP sebanyak 29 % dan LPSE sebanyak 14 %, jenis kelamin laki-laki sebanyak 31% dan perempuan sebanyak 69%, klasifikasi usia <25 tahun sebanyak 14 %, usia 25–50 tahun sebanyak 66% dan usia >50 tahun sebanyak 7 %, dan pengalaman kerja dalam pelaksanaan *e-*

procurement dengan rentang waktu 0-2 tahun sebanyak 23 %, 2-5 tahun sebanyak 57 % dan > 5 tahun sebanyak 20%.

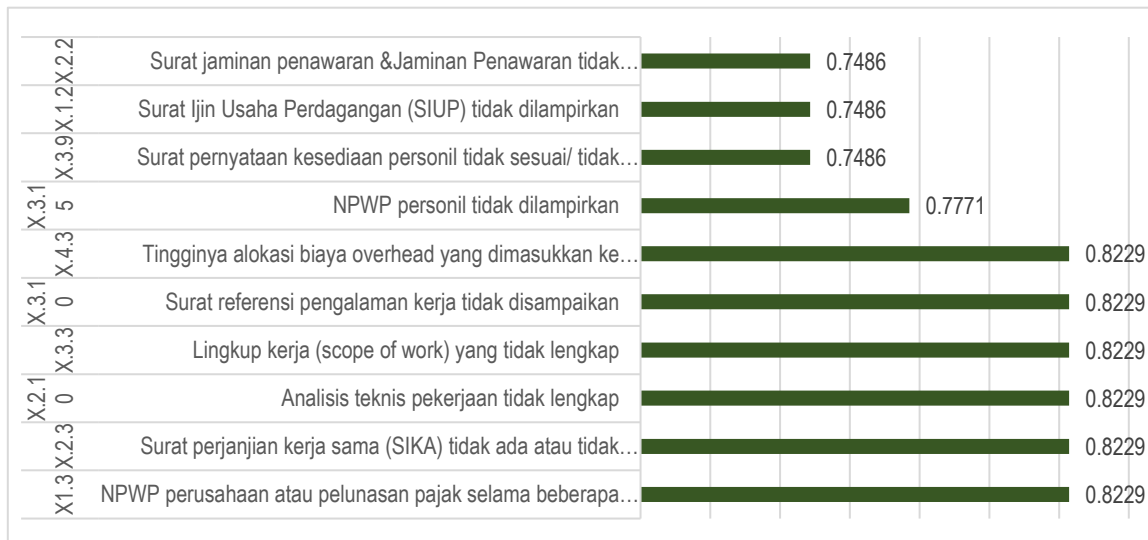
Berdasarkan hasil tabulasi data kuisisioner maka selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan ditemukan 20 variabel yang tidak valid dan reliabel dari 43 jumlah keseluruhan variabel. Perhitungan nilai RII dilakukan hanya pada variabel-variabel yang valid dan reliabel saja, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Variabel-Variabel Kegagalan Kontraktor dalam Evaluasi Penawaran pada *E-Tendering*

Kode Variabel	Keterangan	Nilai RII	Rank
X1.1	Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak dilampirkan	0,7257	17
X.1.2	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak dilampirkan	0,7486	9
X.1.3	NPWP perusahaan atau pelunasan pajak selama beberapa tahun terakhir tidak dilampirkan	0,8229	1
X1.7	Pengalaman mengerjakan proyek sejenis dalam kurun 4 tahun terakhir tidak dilampirkan	0,7486	12
X.2.2	Surat jaminan penawaran & Jaminan Penawaran tidak tersedia atau tidak dilampirkan	0,7486	10
X.2.3	Surat perjanjian kerja sama (SIKA) tidak ada atau tidak dlampirkan	0,8229	2
X.2.7	Surat permohonan dukungan material tidak dilampirkan atau tidak sesuai dokumen penawaran	0,7486	13
X.2.8	Surat permohonan dukungan peralatan tidak dilampirkan atau tidak sesuai dokumen penawaran	0,7257	18
X.2.9	Data-data pendukung persyaratan teknis tidak dilampirkan	0,7486	11
X.2.10	Analisis teknis pekerjaan tidak lengkap	0,8229	3
X.3.2	Spesifikasi teknik tidak memenuhi persyaratan	0,7486	14
X.3.3	Lingkup kerja (<i>scope of work</i>) yang tidak lengkap	0,8229	4
X.3.7	Kualifikasi personil inti tidak memenuhi syarat	0,7486	15
X.3.8	Struktur organisasi tidak lengkap untuk beberapa posisi dalam organisasi proyek	0,7257	19
X.3.9	Surat pernyataan kesediaan personil tidak sesuai/ tidak dilampirkan	0,7486	8
X.3.10	Surat referensi pengalaman kerja tidak disampaikan	0,8229	5
X.3.15	NPWP personil tidak dilampirkan	0,7771	7
X.4.1	Satuan kebutuhan pekerja, material dan alat dalam AHSP tidak dicantumkan	0,7257	20
X.4.3	Tingginya alokasi biaya overhead yang dimasukkan ke dalam harga penawaran	0,8229	6
X.4.7	Kesalahan dalam memprediksi fluktuasi harga	0,7486	16

Berdasarkan hasil perhitungan RII maka diperoleh 10 variabel kegagalan kontraktor yang

paling sering ditemui oleh Pokja-ULP yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Variabel kegagalan yang paling sering ditemui dalam evaluasi penawaran

REFERENSI

- [1] G. C. Abimantara, A. Purwito. “Analisa Kegagalan Kontraktor dalam Proses Tender Sistem *E-Procurement* pada Proyek Pemkot Surabaya Tahun 2018”. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi* Vol. 7, No 1, April 2019, hal 33-41. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- [2] U.D. Arman, A. Sari. “Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatra Barat”. *Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, Vol 9 No. 3, September 2022.
- [3] N. W. Diyah, R.T Komara, S. Djuniati. “Analisa Variabel Kegagalan Kontraktor di Kota Pekanbaru Dalam Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*)”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik*, Volume 2, No. 2, Oktober 2015. Universitas Riau.
- [4] I N. R. Karyasa, I M. Alit K. Salain, M. Nadiasa. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Bandung”. *Jurnal Spektran* Vol. 2. No. 1, Januari 2014. Universitas Udayana.
- [5] D. Masitah. “Analisa Kegagalan pada Proses Tender Pekerjaan Konstruksi di PT. X”. Tugas Akhir, Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [7] M. Respawan, I.K Sudarsana, M. Nadiasa. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dan Nilai Penawaran Peserta Lelang Elektronik (*E-Procurement*) Jasa Konstruksi di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Spektran*, Vol. 5, No.1, Januari 2017, hal. 1-87, Universitas Udayana.

- [8] D.R. Simalango dan H. Setiawan “Fakto-Faktor Penyebab Kegagalan Kontraktor dalam Evaluasi Penawaran di Daerah Istimewa Jakarta”. *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 15, No. 3, Oktober 2021, hal 133 –142. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [9] M. Tanubrata, M. Setiaputri. “Proses Evaluasi Penawaran Kontraktor dengan Sistem Nilai (*Merit Point System*)”. *Jurnal Teknik Sipil* Vol 6 No 2, Oktober 2010, hal 79-192. Universitas Maranatha.